

## DAFTAR PUSTAKA

- Adriani. (2014). *Teori Perpajakan*. Jakarta. Salemba Empat
- Aryobimo, Putut Tri. (2012). *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)*. Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.
- Djajaningrat. (2014). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta. Salemba Empat
- Djoko Slamet Surjoputro dan Junaedi Eko Widodo. (2004). *Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Modernisasi Administrasi Perpajakan*. Jakarta, Penerbit Kharisma.
- Mardiasmo. (2016) . *Perpajakan Edisi Revisi 2016*. Yogyakarta. Penerbit Andi
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi 2018*. Yogyakarta. Penerbit Andi
- Mulyadi, 2010. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nuraida, I. (2018). *Manajemen Administrasi Perkantoran*. Kanisius
- Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. (2015). Jakarta. Direktorat Jendral Pajak
- Prabandaru, A, (2019). *Ketahui Indikator Kepatuhan Pajak Lewat Sistem Self Assesment*. Retrieved from *Klikpajak*: <https://klikpajak.id/blog/perencanaan-pajak/ketahui-indikator-kepatuhanpajak/>

Soemarso. (2007). *Perpajakan :Pendekatan Komprehensif*. Jakarta. Salemba Empat

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta

*Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah*. (2010). Jakarta. Menteri Keuangan Republik Indonesia.

*Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan*. (1985). Jakarta. Menteri Keuangan Republik Inonesia.

*Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. (2009). Jakarta. Menteri Keuangan Republik Indonesia.

*Undang-undang No 28 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. (2007). Jakarta. Menteri Keuangan Republik Indonesia

*Undang-undang No 36 Tentang Perubahan keempat atas Undang-undang No 7 Tahun 1983 Tetang Pajak Penghasilan*. (2008). Jakarta. Menteri Keuangan Republik Indonesia.

*Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan. Ketiga Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak*. (2009). Jakarta. Menteri Keuangan Republik Indonesia.